

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS *PAYMENT ONLINE SYSTEM* PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN (PBB) PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Akademik Ahli Madya (A.Md)  
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**LISA ANGGRAINI**  
**NIM. 01770623364**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

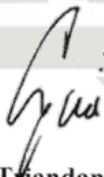
**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : LISA ANGGRAINI  
NIM : 01770623364  
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
SEMESTER : VI (ENAM)  
JUDUL : ANALISIS *PAYMENT ONLINE SYSTEM* PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN  
HULU

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Disetujui Oleh:

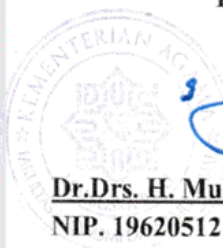
**PEMBIMBING**

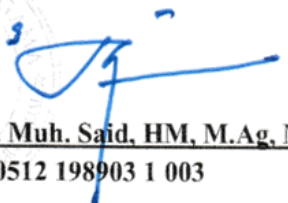


Sahwitri Triandani, SE.M.Si  
NIP. 19820806 200604 2 002

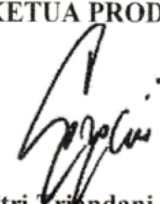
**MENGETAHUI**

**DEKAN**



  
Dr.Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

**KETUA PRODI**

  
Sahwitri Triandani, SE.M.Si  
NIP. 19820806 200604 2 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : LISA ANGGRAINI  
NIM : 01770623364  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
JUDUL : ANALISIS *PAYMENT ONLINE SYSTEM* PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN  
HULU  
TANGGAL UJIAN : 08 Mei 2020

Pekanbaru, 08 Mei 2020

Disetujui Oleh:

**KETUA PENGUJI**

Disetujui tgl 20/05/2020

**FAKHRURROZI, SE, MM**

**NIP. 19670725 20003 2 001**

**ANGGOTA**

**PENGUJI I**

**Dr. Muhammad April SH, M.Hum**  
**NIP. 130712072**

**PENGUJI II**

**Muammar Alkadafi, S. Sos, M.Si**  
**NIP. 13071205**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **ANALISIS PAYMENT ONLINE SYSTEM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

*Oleh : Lisa Anggraini*

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dimulai pada tanggal 13 Februari sampai dengan 13 Maret 2020. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang payment online system pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pajak bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mulai dipungut pada tahun 2012 dengan pembayaran secara Offline, kemudian pada tahun 2018 Bapenda Kabupaten Rokan Hulu mulai menerapkan Payment Online System (POS). Perubahan sistem pembayaran dari manual ke online dipelopori oleh masih banyaknya kekurangan yang terdapat pada sistem pembayaran secara manual dan juga dipicu oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Beralihnya sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan memberikan pengaruh yang cukup positif terhadap penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Pembayaran dengan menggunakan POS lebih memberikan kemudahan bagi berbagai pihak baik dari masyarakat sebagai wajib pajak, bapenda sebagai penerima pajak maupun pihak Bank sebagai perantara pembayaran Pajak. Kemudahan yang diberikan POS terletak pada waktu yang relatif lebih singkat dan lebih hemat tenaga. Namun tentunya sebagai suatu sistem POS tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Penerapan Payment Online System (POS) dapat berjalan efektif jika dalam penerapannya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar memudahkan masyarakat dalam menggunakannya.

**Kata Kunci : *Payment Online System (POS) dan Pajak Bumi Bangunan.***

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh**

Alhamdulillahirabbil'alamin Puji dan Syukur kepada Allah SWT, Karena dengan Rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Analisis Payment Online System Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu**”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan motivasi, bantuan, saran dan nasehat serta bimbingan dalam menyelesaikan studi maupun dalam rangka penyusunan tugas akhir ini kepada :

Kedua Orang tua penulis Ayahanda Deshelmi dan Ibunda Elna Dewita, yang tidak henti-hentinya mendoakan anaknya, memberikan nasehat, didikan yang baik serta dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat merasakan belajar di perguruan tinggi dan menyelesaikan tugas akhir ini, semoga perjuangan ayahanda dan ibunda mendapat balasan dari Allah SWT.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Wakil Dekan I, II, dan III yang memberikan Rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

Ibu Irien Violinda Anggraini, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan didikannya.

7. Bapak Bambang Nurdiansyah, SE yang telah banyak memberikan informasi pada saat penulis menyelesaikan tugas akhir ini, sukses selalu buat bapak

8. Kak Restu dan seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu atas segala bantuan dan kerjasama yang telah diberikan selama dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Kakak saya Lusi Santia dan adik adik saya Silvia Febrika, Ahmad fauzan yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada saya sukses selalu uni Lusi dan untuk adik saya semangat belajarnya dan semoga sukses, serta seluruh keluarga saya yang turut mendoakan saya semoga sukses selalu.

9. Terimakasih Buat Rekan-rekan saya Mahasiswa Administrasi Perpajakan angkatan 2017, sukses selalu buat kalian semua.

10. Terimakasih buat kisanahku, zulma, mona serta Teman-teman Kos Aulia yang turut memberikan dukungan kepada saya, sukses buat kalian semua dan dilancarkan segala urusannya.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut andil selama penulisan TA ini, semoga Allah SWT. Membalas kebbaikannya.

Semoga semua bantuan, dukungan dan Do'a yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga Tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 13 Maret 2020

Penulis,

**Lisa Anggraini**  
**Nim. 01770623364**

UIN SUSKA RIAU

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Lokasi Penelitian .....	6
1.4.2 Waktu Penelitian.....	6
1.4.3 Jenis data.....	6
1.4.4 Metode Pengumpulan Data .....	7
1.4.5 Analisis Data.....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b>	
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.....	10
2.2 Lokasi Geografis Kantor Bapenda Kabupaten Rokan Hulu .....	11
2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab Rohul.....	11
2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab Rokan Hulu .....	13
2.5 Uraian Tugas .....	16
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b>	
3.1 Tinjauan Teori .....	31
3.1.1 Pengertian Pajak .....	31
3.1.2 Fungsi Pajak .....	32



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.3	Jenis-jenis Pajak .....	34
3.1.4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) .....	38
3.1.5	Objek PBB P-2 .....	38
3.1.6	Pengecualian Objek PBB P-2 .....	39
3.1.7	Tarif PBB P-2 .....	40
3.1.8	Dasar Pengenaan PBB P-2 .....	40
3.1.9	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) .....	41
3.1.10	Mekanisme PBB P-2 .....	42
3.1.11	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan .....	42
3.1.12	Sistem Pembayaran Pajak.....	44
3.1.13	Payment Online System (POS).....	45
3.1.14	Pajak Dalam Islam.....	47
3.2	Tinjauan Praktek.....	49
3.2.1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Rokan Hulu.....	49
3.2.2	Perbandingan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Menggunakan POS.....	51
3.2.3	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Dengan <i>Payment Online System</i> .....	60
3.2.4	Kendala Penerapan <i>Payment Online System</i> di Kabupaten Rokan Hulu .....	62
3.2.5	Perbandingan Antara Teori dan Praktek.....	63
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
4.1	Kesimpulan.....	64
4.2	Saran.....	65

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan PBB P-2 kabupaten Rokan Hulu .....	4
Tabel 3.1	Perbandingan Pembayaran PBB P-2 .....	60
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Penerimaan PBB P-2 Sebelum Menggunakan POS.....	60
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Penerimaan PBB P-2 Setelah Menggunakan POS.....	61
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Objek PBB P-2 .....	63

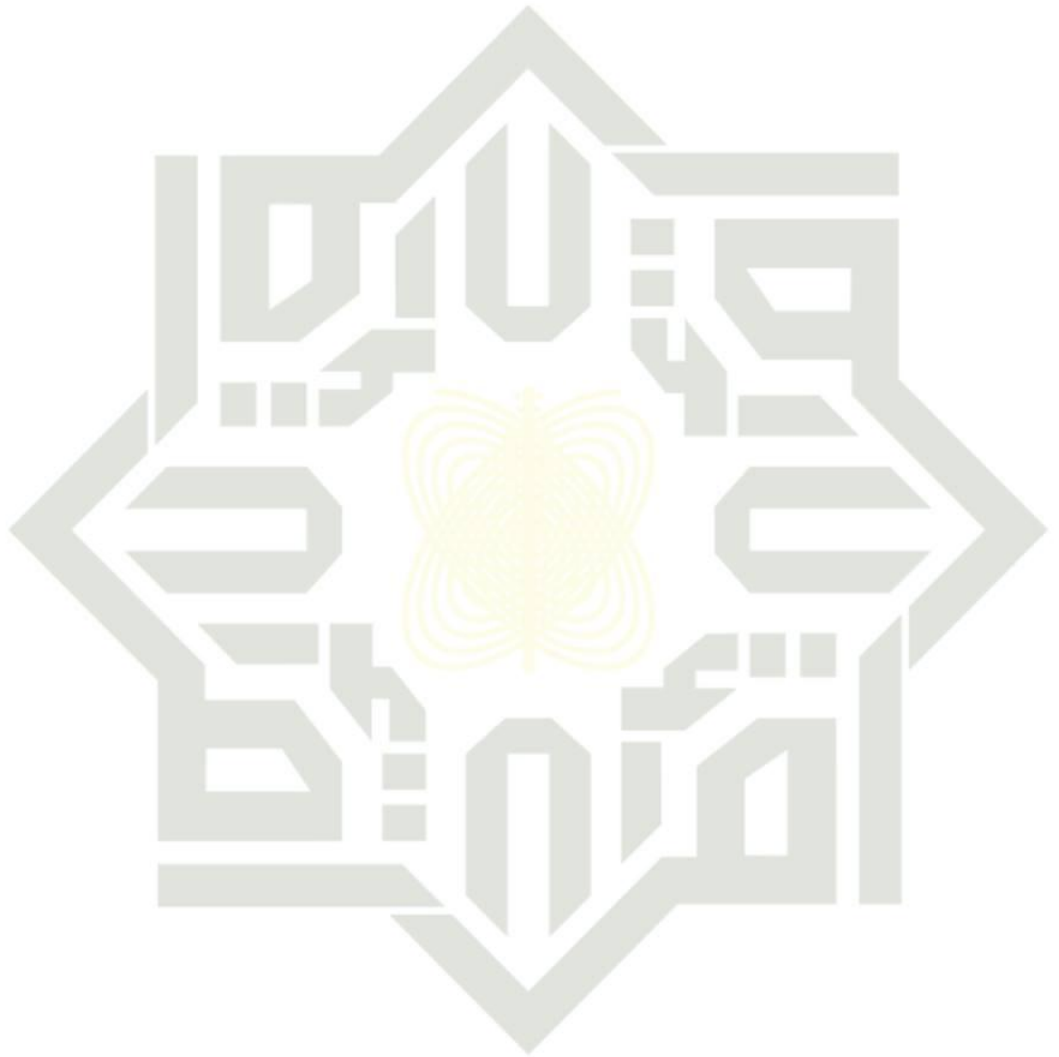


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu .....	15
Gambar 3.1 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan.....	43



UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak berperan penting dalam perekonomian negara khususnya di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia pajak bukan merupakan suatu yang asing lagi, sebagian kalangan masyarakat telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara. Pajak menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas negara, dengan partisipasi masyarakat di bidang perpajakan akan berdampak baik untuk kemajuan dan pembangunan negara.

Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini maka pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Sehingga dengan kebijakan tersebut dapat berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong/pemungut pajak (Resmi, 2017: iii)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut berdasarkan objeknya. Objek PBB adalah Bumi/Tanah dan bangunan, artinya yang menjadi sasaran dalam pemungutan PBB adalah bumi/tanah dan bangunan tanpa memperhatikan keadaan dari subjek atau wajib pajak itu sendiri. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit umum, dan sekolah menjadi lebih mudah terealisasi dengan adanya PBB. Selain itu,

Pemerintah Kabupaten/kota juga memperoleh manfaat dari PBB diantaranya yaitu untuk Subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak, dana untuk mengembangkan transportasi umum, dana pemilu, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, serta untuk pengeluaran daerah lainnya.

Undang-undang yang mengatur tentang PBB adalah undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994. Untuk kabupaten/kota diatur lebih khusus lagi oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi daerah yang disahkan pada 15 September 2009. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, maka wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) diserahkan ke pemerintah Kabupaten/kota. Penyerahan PBB P-2 kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat diterapkan pada masing-masing kabupaten/kota pada 1 Januari 2014.

Mardiasmo (2018: 389), Sejak ditetapkan sebagai Pajak Daerah maka Pemerintah Kabupaten/kota wajib memungut PBB P-2 kepada orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Orang pribadi atau badan yang memiliki objek PBB melakukan pendaftaran kepada pemerintah daerah wilayah Objek Pajak tersebut, kemudian pemerintah menetapkan jumlah pajak yang terutang. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang mana NJOP tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar per

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah yang ditetapkan oleh menteri keuangan, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Kewajiban yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Rokan Hulu mengelola PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) mulai 2 januari 2012 yang mana kepengurusan dalam bidang PBB P-2 ini diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu. Mulai dari proses pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan serta pelayanannya.

Pembayaran PBB P-2 di Kabupaten Rokan Hulu mulanya dilakukan secara manual, yaitu wajib pajak berhadapan langsung dengan fiskus atau pemerintah sebagai pemungut pajak. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, maka reformasi perpajakan dirasa perlu dan penting untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan adalah dari segi pembayaran. Yaitu beralih dari pembayaran secara manual ke pembayaran secara online atau yang lebih dikenal dengan *payment online system* (POS). Dengan diterapkannya *payment online system* pada pembayaran PBB diharapkan dapat memudahkan masyarakat Rokan Hulu dalam membayar pajak yang terutang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sehingga dapat mendongkrak penerimaan daerah pada Kabupaten Rokan Hulu khususnya dari sektor PBB P-2.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui BAPENDA bekerjasama dengan PT Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian dalam menerapkan sistem pembayaran PBB P-2. Hal ini dibuktikan dengan sudah dilaksanakannya penandatanganan MoU antara BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu dengan PT Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian, Pada 20 Juli 2018. Sehingga masyarakat Rokan Hulu tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor BAPENDA atau UPTB, namun bisa langsung mendatangi PT Bank Riau Kepri terdekat.

Berikut target dan realisasi penerimaan PBB P-2 pada Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016-2019

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB P-2 Kabupaten Rokan Hulu**

Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
2016	14.924.983.031	5.593.475.529	37.00%
2017	13.081.446.941	7.149.139.265	55.00%
2018	16.730.023.864	8.982.977.887	54,00%
2019	16.505.756.726	9.558.177.784	58,00%

Sumber : Badan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu (2020)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk pendapatan PBB P-2 disetiap tahunnya mengalami peningkatan Yang signifikan walaupun belum mencapai target. Pada tahun 2016-2017 pembayaran PBB P-2 masih belum menggunakan *Payment Online System (POS)* atau pembayaran masih dilakukan secara *Offline* dan untuk tahun 2018-2019 sudah menggunakan *Payment Online System (POS)*.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir yaitu *Analisis Payment Online*

System Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Perbandingan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Menggunakan *Payment Online System* di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apa Kendala Penerapan *Payment Online System* (POS) Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Perbandingan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Menggunakan *Payment Online System* di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk Mengetahui Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Sesudah Menggunakan *Payment Online System* di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang perpajakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang berguna bagi peneliti lainnya dalam permasalahan yang sama.
3. Dapat menyumbangkan pemikiran terhadap masalah yang berkaitan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

### 1.4 Metode Penelitian

#### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu Jln. Tuanku Tambusai Km 4 Komplek Bina Praja Perkantoran Pemda Pasirpengaraian, tepatnya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

#### 1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 13 Februari sampai dengan 13 Maret 2020.

#### 1.4.3 Jenis Data

Penulis menggunakan data primer dan sekunder dalam penulisan :

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil penulis secara langsung dari objek penelitian.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis ambil secara tidak langsung dari objek penelitian. Penulis mendapatkan data yang sudah jadi dan dikumpulkan oleh pihak lain yang dijadikan dalam bentuk dokumen, arsip dan catatan lain yang diperlukan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi :

#### 1. Observasi

Observasi adalah perolehan aktif informasi dari sumber utama.

Penulis turun langsung kelapangan untuk mengamati secara dekat permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai *Payment Online Sistem* pajak bumi dan bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber guna untuk mendapatkan informasi akurat yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis. Pengambilan data melalui wawancara dilakukan baik secara lisan/langsung maupun lewat telephon.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara Mengambil data dari catatan dokumentasi maupun arsip sesuai dengan yang penulis butuhkan. Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen dan arsip dari tempat penelitian.

### 1.4.5 Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul selama proses penelitian tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) dibagi menjadi 4 (empat) bab yang setiap babnya saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

Bab ini penulis menguraikan Gambaran Umum Instansi tempat penelitian, Sejarah Bapenda Kabupaten Rokan Hulu, Visi Misi, Sasaran dan Tujuan Kabupaten Rokan Hulu, Struktur Organisasi dan aktivitas yang ada di Bapenda Kabupaten Rokan Hulu tersebut.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini berisikan Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Jenis-jenis Pajak, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Objek Pajak Bumi Dan Bangunan, Penegcualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Tarif Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, *Payment Online System*, Pajak Dalam Islam, Perbandingan antara teori dan praktek dalam pembayaran Pajak bumi dan bangunan, Perbandingan pembayaran PBB sebelum dan setelah menggunakan POS, Kendala yang terjadi setelah menggunakan POS,

Target dan realisasi penerimaan setelah menggunakan POS Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

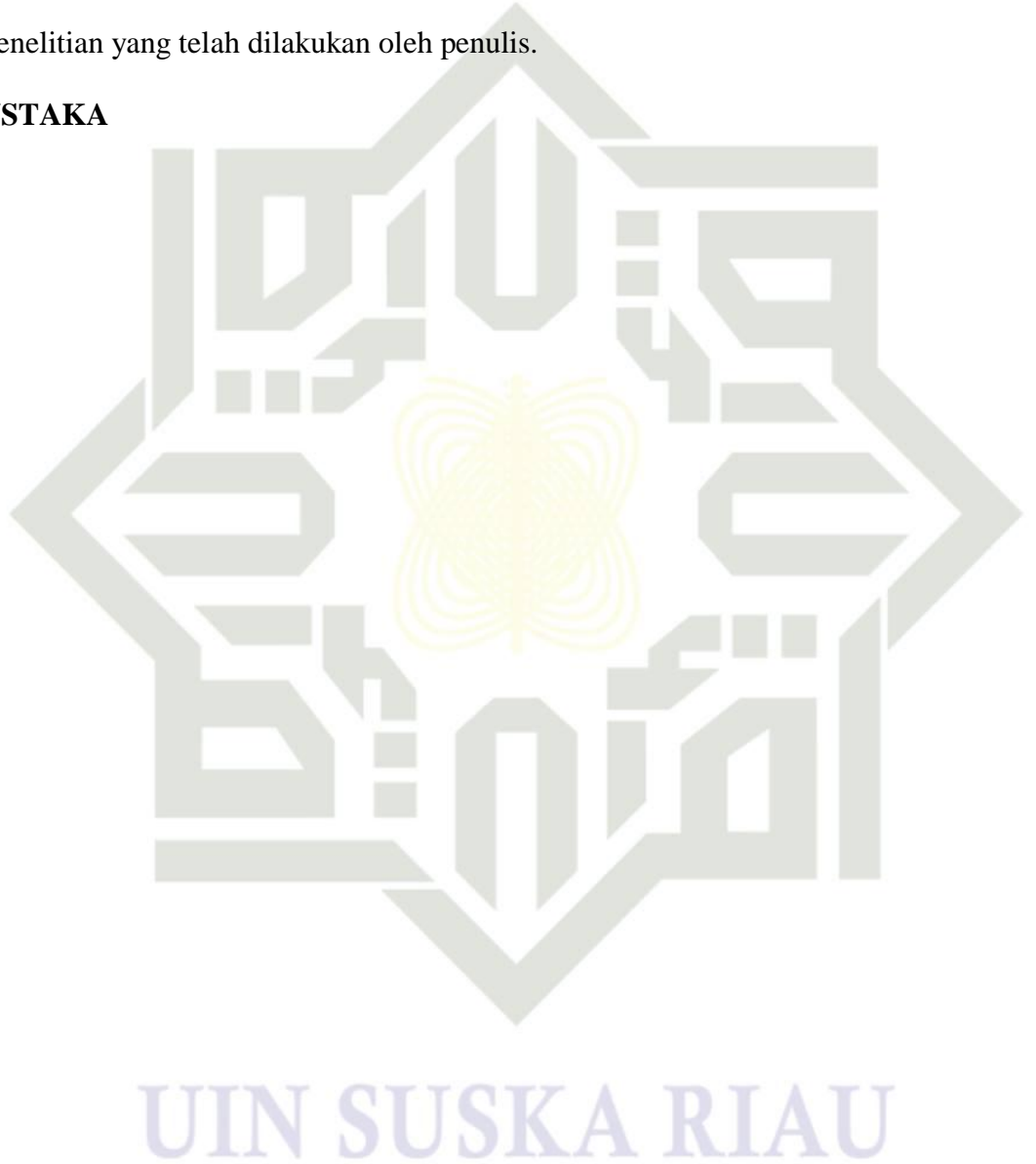
#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab Penutup ini berisikan Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 212 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juncto pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka dari itu Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu bersama Bupati Rokan Hulu Memutuskan Menetapkan: Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016.

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati memperhatikan asas:

- a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Pembagian Habis Tugas;
- e. Rentang Kendali;



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Tata Kerja Yang Jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten rokan hulu yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten rokan hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Badan Pendapatan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan pajak dan retribusi.

### 2.2 Lokasi Geografis Kantor Bapenda Kabupaten Rokan Hulu

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terletak di Jln. Panku Tambusai Km 4 Komplek Bina Praja Perkantoran Pemda Pasirpengaraian, tepatnya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

### 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Sejalan dengan tuntunan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999,

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah membuat visi dan misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perancangan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental masa depan, dengan demikian Visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga Visi menjadi milik bersama yang diyakini seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dalam RPJMD kabupaten rokan hulu 2017-2022, tidak ditetapkan Visi masing masing OPD yang ada hanya Visi kabupaten rokan hulu yaitu ***“Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan Dan Kehidupan Agamis Yang Harmonis Dan Berbudaya.”***

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut maka disusunlah Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Misi yang ditetapkan yaitu :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat perdesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat;
- b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketakwaan;
- c. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat perdesaan;
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
- e. Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

#### 2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

terdiri dari:

Kepala Badan Bapenda

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pendataan;
- c. Bidang Pembukuan;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bidang Penagihan dan Keberatan;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas; Dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;

Bidang Pendataan terdiri dari:

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Seksi Penilaian;
- c. Seksi Pengolahan Data;

4. Bidang pembukuan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- b. Seksi PBB dan BPHTB;
- c. Seksi Penetapan;

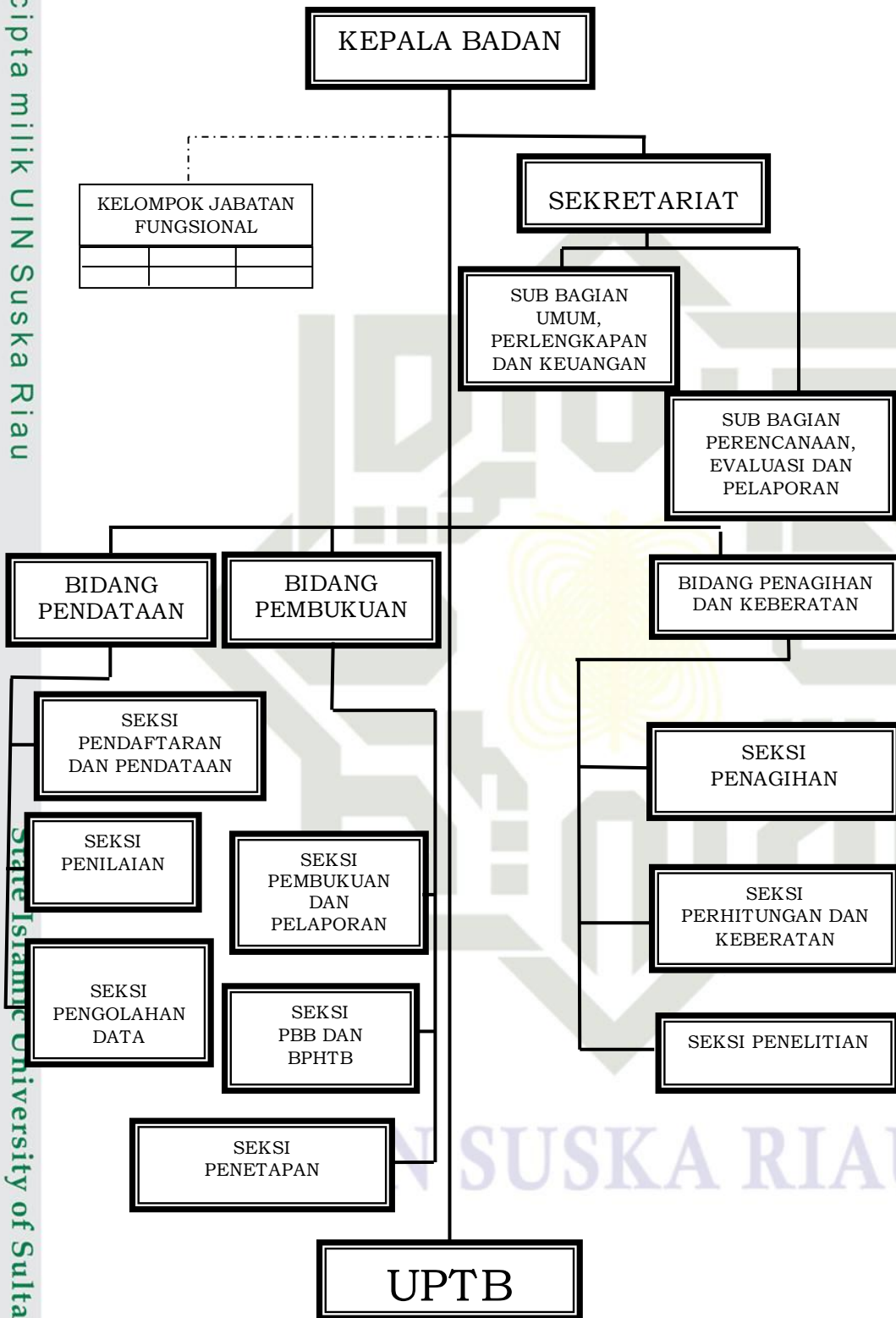
Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

- a. Seksi Penagihan;
- b. Seksi Penghitungan dan Keberatan; dan
- c. Seksi Penelitian.

Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan pendapatan daerah Rokan Hulu**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Uraian Tugas

Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

### 1. Kepala Badan

Dalam penyelenggaraan tugasnya kepala badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan badan;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai badan;
- g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran / pengguna barang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dengan tugas melakukan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi kepegawaian, dan melaksanakan administrasi perlengkapan dan perawatan, serta menata usahakan kegiatan lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan;
- b. Pelaksanaan rencana anggaran baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan dilingkungan badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu;
- c. Pelaksana penyusunan data, informasi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- d. Menyusun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja dilingkungan badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu;
- e. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja dilingkungan badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu
- f. Menyusun rencana anggaran, pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, gaji dan tunjangan pegawai serta pelaksanaan pendapatan lain-lain;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, perencanaan dan pembangunan pegawai, peningkatan kemampuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai.

**a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan data, informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) Merencanakan kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 2) Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- 3) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Membimbing para bawahan di lingkungan Sub bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 5) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 6) Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 7) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja.

**b. Sub Bagian Umum, Perlengkapan Dan Keuangan**

Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi, dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai tupoksi umum, pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah serta menyusun program keuangan dalam laporan keuangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 2) Memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 3) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian dengan memberikan arahan, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- 4) Memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 5) Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 6) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

**3. Bidang Pendataan**

Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dengan tugas Membantu kepala badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi di bidang Pendaftaran dan Pendataan, Penilaian dan Keberatan, serta pengolahan data.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendataan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
- c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- d. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah.

**a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan**

Seksi Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pendataan dengan tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dibidang Pendaftaran dan Pendataan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi:

- 1) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD / SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- 2) Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah;
- 3) Melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- 4) Melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak /Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**b. Seksi Penilaian**

Seksi Penilaian dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dengan tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dibidang Penilaian,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penilaian mempunyai fungsi :

- 1) Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SSPD BPHTB;
- 2) Melakukan penilaian nilai jual objek pajak;
- 3) Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB P-2;
- 4) Melakukan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah;
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**c. Seksi Pengolahan Data**

Seksi Pengolahan Data dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dengan tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dibidang pengolahan Data.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- 1) Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD;
- 2) Mengolah data formulir pendaftaran / SPOP PBB P-2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak;
- 3) Mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melakukan entry data hasil pelayanan PBB P-2 dan perubahan peta;
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 4. Bidang Pembukuan

Bidang Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dengan tugas Membantu kepala badan dalam melaksanakan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pembukuan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P-2;
- c. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P-2;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi; dan
- e. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah

##### a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembukuan yang mempunyai tugas Membantu kepala bidang dalam melaksanakan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- 2) Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P-2;
- 3) Pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P-2;
- 4) Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
- 5) Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**b. Seksi PBB dan BPHTB**

Seksi PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dengan tugas membantu kepala bidang Pembukuan dalam melaksanakan tugas dibidang PBB dan BPHTB.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- 1) Menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB;
- 2) Melakukan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB;
- 3) Melakukan koordinasi pemungutan PBB P-2;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyusun laporan PBB (mingguan dan bulanan) dan BPHTB (bulanan);
- 5) Melakukan perhitungan tunggakan PBB P-2 dan BPHTB;
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**c. Seksi Penetapan**

Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dengan tugas membantu kepala bidang Pembukuan dalam melaksanakan tugas dibidang Penetapan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penetapan mempunyai fungsi:

- 1) Menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
- 2) Melakukan pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah selain PBB P-2 dan BPHTB;
- 3) Melakukan perhitungan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**5. Bidang Penagihan dan Keberatan**

Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris yang mempunyai tugas Membantu kepala badan dalam melaksanakan Penagihan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya, melaksanakan penghitungan serta memproses keberatan dan surat permohonan banding serta mengadakan penelitian lapangan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- c. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding; dan
- d. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Seksi Penagihan**

Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan dengan tugas membantu kepala bidang Penagihan dan Keberatan dalam melaksanakan tugas dibidang Penagihan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi penagihan mempunyai fungsi:

- 1) Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
- 2) Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- 3) Memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- 4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**b. Seksi Penghitungan dan Keberatan**

Seksi Penghitungan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan dengan tugas membantu kepala bidang Penagihan dan Keberatan dalam melaksanakan tugas dibidang Penghitungan dan Keberatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penghitungan dan Keberatan mempunyai fungsi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- 2) Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 3) Melaksanakan penghitungan surat ketetapan pajak/retribusi daerah (skpd/skrd), surat ketetapan pajak/retribusi daerah kurang bayar (skpdkb/skrdkb), surat ketetapan pajak/retribusi daerah lebih bayar (skpdlb/skrdlb), surat ketetapan pajak/retribusi daerah kurang bayar tambahan (skpdkbt/skrdkbt), surat ketetapan pajak/retribusi daerah nihil (skpdn/skrdn);
- 4) Memproses surat keberatan dan surat permohonan banding;
- 5) Memproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

#### c. Seksi Penelitian

Seksi Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan dengan tugas membantu kepala bidang Penagihan dan Keberatan dalam melaksanakan tugas dibidang Penelitian

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada, kepala Seksi Penelitian mempunyai fungsi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 2) Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah;
- 3) Melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB - P2;
- 4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul Analisis *Payment Online System* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembayaran PBB di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2012-2017 masih dilakukan secara *offline* atau manual sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam mengurus pembayarannya dan pada sistem pembayaran *Offline* masih banyak terdapat kekurangan lainnya. kemudian seiring dengan perkembangan teknologi dan jaringan, kominfo memunculkan sistem pembayaran secara online. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu mulai menerapkan sistem online pada pembayaran PBB pada tahun 2018 dan menjadikan ini sebagai salah satu cara untuk mendongkrak penerimaan daerah.
2. Penerapan *Payment Online System* (POS) pada Pembayaran PBB P-2 di Kabupaten Rokan Hulu memberikan dampak yang cukup positif terhadap penerimaan daerah dari sektor PBB P-2, sehingga terjadi peningkatan penerimaan dari tahun sebelum diterapkannya *Payment Online System*.
3. Banyak manfaat yang ditawarkan dalam pembayaran pajak secara online, seperti: membayar pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dapat menghemat waktu dan tenaga, serta dapat meminimalisir kesalahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jumlah Objek pajak yang membayar PBB pada tahun pertama diterapkannya *Payment Online System* menurun dari tahun sebelum diterapkannya *Payment Online System*, hal ini disebabkan pada tahun 2017 banyak objek pajak baru yang mendaftar PBB P-2 namun tidak semua Objek pajak yang terdaftar tersebut melakukan pembayaran kembali pada tahun 2018. Artinya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar PBB masih kurang walaupun pemerintah sudah memudahkan sistem pembayarannya.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu merespon lebih cepat sistem pembayaran online yang dimunculkan Kominfo dan menerapkannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih awal
2. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mempertahankan sistem yang sudah ada serta menambah Fasilitas yang mendukung penerapan *Payment Online System* di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Hendaknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu memberikan Informasi yang lebih spesifik kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.
4. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan terhadap objek pajak yang sudah terdaftar PBB P-2 tetapi belum melakukan pembayaran. Selain itu , penyuluhan tentang pentingnya PBB bagi Kabupaten Rokan Hulu juga harus dilakukan agar kesadaran masyarakat meningkat.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. 2016. Surah An-Nisa ayat 29. Al-Qur'an dan terjemahan. Jakarta Selatan: Penerbit Wali.
- Al-Qur'an. 2016. Surah An-Nisa Ayat 59. Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta Selatan: Penerbit Wali.
- Endriandi, Primandita, Yuda Ariyanto dan Agus puji. 2015. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- <https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/membayar-pajak-lebih-mudah-dengan-cara-online/> diakses pada 10 januari 2020 pukul 10.30.
- Kazwaini. 2017. "Epistimologi Perpajakan Dalam pemikiran Al- Mawardi". *Jurnal Pemikiran Islam*. Pekanbaru.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Rawadani dan fidiana. 2018. "Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum dan Sesudah Sistem Pajak Online". *Jurnal Ekonomi*. Surabaya.
- Resmi, siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 buku*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samsiah. 2013. *Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui Payment Online System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta. Diakses pada 19 Februari 2020 pukul 14.20.
- Saahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali pers.
- Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin. 2016. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jawa Timur: Empatdua Media.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

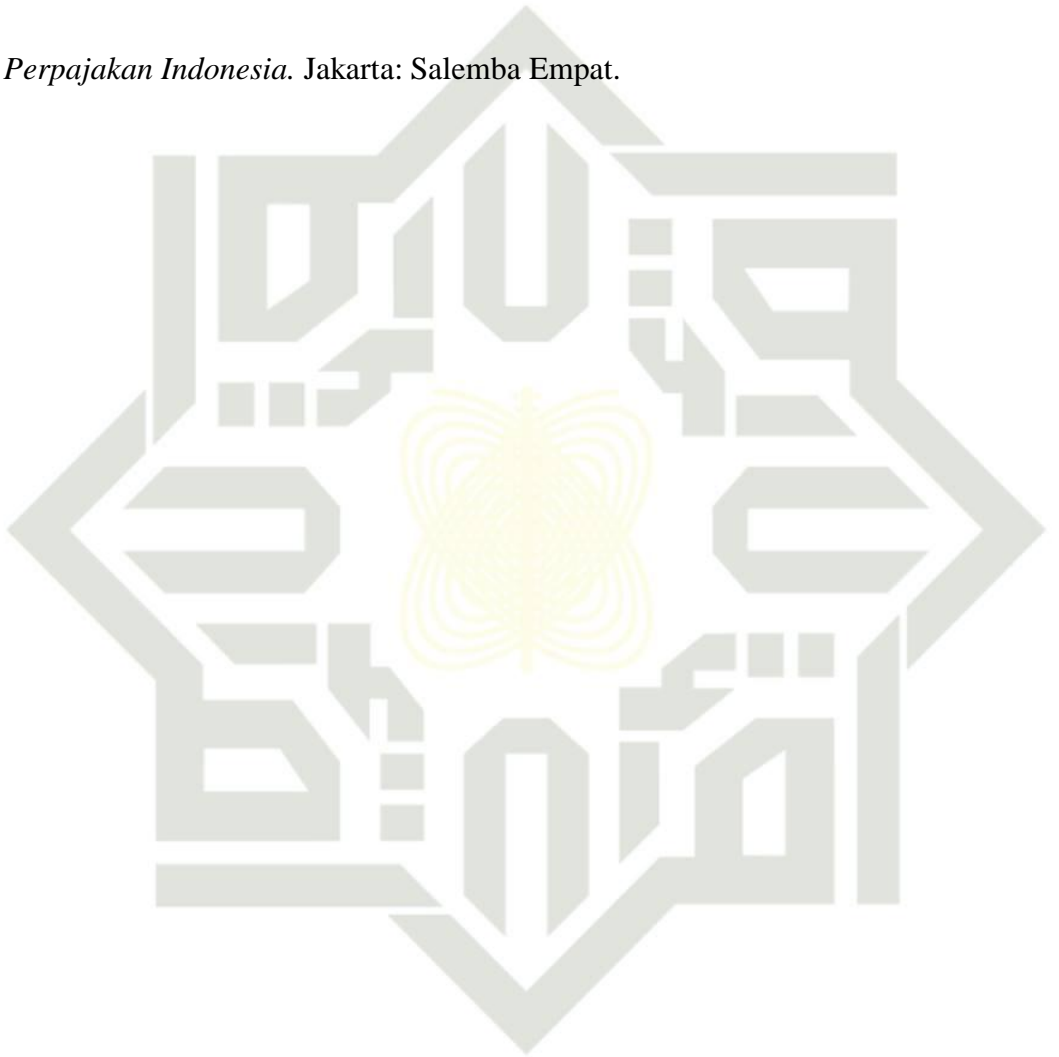
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surahman, mahan dan Fadhillah illahi. 2017. “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Bandung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## LAMPIRAN

Wawancara;

Dokumentasi;

Bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB;

Bentuk Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Sebelum menggunakan POS yang dikeluarkan Pihak Bapenda Rokan Hulu;

Bentuk Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Setelah menggunakan POS yang dikeluarkan oleh pihak Bank Riau Kepri;

6. Surat Bimbingan Laporan Penelitian;

7. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial;

8. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;

9. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Wawancara

1. Kapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Mulai dipungut di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Berapa Besarnya Tarif PBB P-2 yang diterapkan di Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apa Dasar Hukum Pelaksanaan Pemungutan dan Pembayaran PBB P-2 di Kabupaten Rokan Hulu?
4. Bagaimana Prosedur Pembayaran PBB P-2 sebelum Menggunakan Payment Online System (POS)?
5. Kapan Sistem Pembayaran Online Mulai diterapkan di Kabupaten Rokan Hulu?
6. Mengapa Sistem Pembayaran PBB P-2 di Rokan Hulu di ganti dengan Sistem Pembayaran Online?
7. Bagaimana Prosedur Pembayaran PBB P-2 Setelah Menggunakan Payment Online Sistem ?
8. Apa Keuntungan dan Kendala Setelah diterapkannya Payment Online System (POS)?
9. Apakah Setelah diterapkannya Payment Online System mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Daerah?

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2 Dokumentasi



## 3. Bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan

FEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

00219127  
SPPT PBB  
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPENILAIAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2019**  
AKUN: 411311  
PEDESAAN  
#2602201217501J31386038LN/01#

NOP: 14. 07. 060. 013. 000-0035. 7

LETAK OBJEK PAJAK  
RT: RW:  
KEPENUHAN MAKMUR  
KEPENUHAN  
ROKAN HULU

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK  
JUFRI  
DS. KEPENUHAN MAKMUR  
RT: RW:  
KEPENUHAN MAKMUR  
ROKAN HULU  
NPWP: - . . . . 000

OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NJOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	20. 000 0	088	7. 150 0	143. 000. 000 0

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 143. 000. 000  
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0  
 NJOP untuk penghitungan PBB = 143. 000. 000  
 PBB yang Terhutang = 0. 11 % x 143. 000. 000 157. 300

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 157. 300  
 SERATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 31 DESEMBER 2019  
 TEMPAT PEMBAYARAN :  
 BANK RIAU CAPEM KOTA TENGAH  
 KOTA TENGAH

PASIR PENGARAIAN, 26 FEB 2020  
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN ROKAN HULU  
 ELBIZRI, S.STP/M.Si  
 Pembina Tk.IV/b  
 NIP. 19780806 199711 1 001




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Bentuk STTS Sebelum menggunakan POS yang dikeluarkan Pihak Bapenda Rokan Hulu**

**5. Bentuk STTS Setelah menggunakan POS yang dikeluarkan oleh pihak Bank Riau Kepri**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

---

**Nomor** : Un.04/F.VII/PP.00.9/425/2020  
**Sifat** : Biasa  
**Lampiran** : -  
**Hal** : **Izin Penelitian**

**Pekanbaru, 21 Januari 2020 M**  
**25 Jumadil Awwal 1441 H**

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan  
 Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Lisa Anggraini  
 NIM. : 01770623364  
 Jurusan : D-III Perpajakan  
 Semester : VI (Enam)

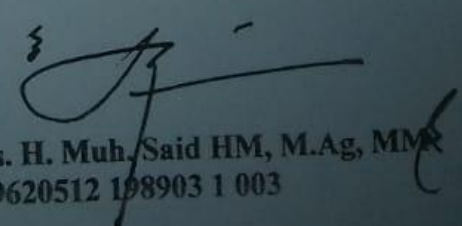
  


bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian  
 dengan judul: **"Analisis Payment Online System Pajak Bumi dan Bangunan  
 (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu"**. Untuk itu  
 kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan  
 kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan  
 terima kasih.

Dekan,  
  
**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MMR**  
**NIP. 19620512 198903 1 003**







# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmpptsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmpptsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmpptsp.rokanhulukab.go.id>

## REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/056

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari DPMPPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/30057 tanggal 23 Januari 2020 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan LTA, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : LISA ANGRRAINI  
Nomor Induk Mahasiswa : 01770623364  
Jurusan : Administrasi Perpajakan  
Jenjang : D-III  
Judul Penelitian : Analisis Payment Online System Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu  
Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 24 Februari 2020



a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos, M.Si  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP.19740727 200012 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
5. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp: (0761) 39064 Fax: (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/30057  
TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/425/2020 Tanggal 21 Januari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : LISA ANGGRAINI   |
| 2. NIM / KTP         | : 01770623364  |
| 3. Program Studi     | : PERPAJAKAN   |
| 4. Jenjang           | : DIII   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : ANALISIS PAYMENT ONLINE SYSTEM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu  
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ 4. Yang Bersangkutan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BIOGRAFI PENULIS



LISA ANGGRAINI, lahir di Mungka pada tanggal 14 Maret 1999. Merupakan putri dari Bapak Deshelmi dan Ibu Elna Dewita, yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara dengan nama kakak Lusi Santia dan dua adik yang bernama Silvia Febrika dan Ahmad Fauzan.

Penulis mengawali pendidikan formal pada SD Negeri 016 Ujungbatu tahun 2005, setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 1 Ujungbatu pada tahun 2011, pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan tingkat atas yaitu di SMA Negeri 2 Ujungbatu dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu selama 2 bulan, yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2019. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan tugas akhir dengan judul “***Analisa Payment Online System Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu***”.

UIN SUSKA RIAU